

# KEHIDUPAN PETANI PASCA KONVERSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)

Asep Suherman

Universitas Alkhairaat

email korespondensi: rizqi\_ovie\_suherman@yahoo.co.id

## Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap kehidupan petani pasca konversi lahan sawah beririgasi menjadi perumahan/pemukiman, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berdisain *multiple case studies*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), mencatat dan mendokumentasikan data yang diperlukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penggunaan lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, berproses menurut mekanisme pasar sehingga proses konversi lahan sulit dicegah atau dihentikan; (2) Hak milik yang melekat pada lahan merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki orang atas lahan, oleh sebab itu penggunaannya atau pemanfaatannya cenderung bergantung pada keinginan pemilik lahan, sehingga memiliki kebebasan untuk melakukan konversi, namun demikian semua hak atas lahan mempunyai fungsi sosial; (3) Konversi lahan pertanian ke nonpertanian dapat mendorong tumbuhnya macam-macam pekerjaan baru; (4) Keberhasilan petani di dalam peningkatan status sosial dan ekonomi, dapat mempercepat terjadinya konversi lahan.

**Kata kunci :** kehidupan petani, konversi lahan, lahan sawah beririgasi.

## Abstract

*This study intended to gain insight on the changes of the livelihood of farmers following the conversion of the irrigated rice-land into residential and trade area in Indramayu district. The research method is qualitative with case study approach of multiple case design. The techniques for data collection involved literature study, observation, in-depth interviews, writing and documenting the necessary data. The result shows that (1) The use of agricultural land, except for the arranged public and specified by government, to proceed according to the market mechanism so that the conversion process is difficult to prevent or to terminate; (2) As property right attached to the land represent strong right and full of had by owner. They have the freedom to converse their land. Although all right to the farm have social function; (3) Conversion agriculturev farm to non-agriculture can push the growing of the new works; (4) The success of farmer in improving the social and economic status can accelerate land conversion.*

**Keyword :** farmers livelihood, land conversion, irrigated land.

## Pendahuluan

Pembangunan pertanian, dalam era globalisasi memerlukan perhatian yang serius dan diarahkan untuk membangun masyarakat pedesaan. Pembangunan masyarakat di pedesaan perlu diarahkan pada pengembangan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik sehingga konversi lahan pertanian ke nonpertanian dapat dicegah secara alamiah. Di pihak lain menurut Ilham, dkk. (2004), pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Dengan kondisi demikian, maka permintaan terhadap lahan untuk penggunaan hal tersebut semakin meningkat. Akibatnya banyak lahan sawah, terutama yang berada di sekitar perkotaan, mengalami konversi ke penggunaan nonpertanian. Hal ini disebabkan lahan sawah di sekitar perkotaan tersebut mempunyai tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian lainnya.

Masalah konversi lahan ini semakin kompleks pada era otonomi daerah, karena dalam meningkatkan pembangunan daerahnya, pemerintah daerah semakin intensif melakukan upaya-upaya yang mendorong investor berinvestasi di daerahnya. Kebijakan tersebut bila tidak dilakukan dengan cermat maka akan semakin mempercepat konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian.

Menurut Isa (2006), berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), konversi lahan sawah ke non pertanian itu telah direncanakan sejak

awal. Luas total sawah secara nasional adalah 8.903.220 ha, yang terdiri dari sawah beririgasi 7.314.740 ha (82,16 %) dan sawah non-irigasi 1.588.480 ha (17,84 %). Lahan sawah tersebut berdasarkan zonasinya terbagi ke dalam zona konversi 1.041.323 ha (11,70 %), zona konversi terbatas 3.011.577 ha (33,82 %), dan zona perlindungan 4.850.320 ha (54,48 %). Artinya ada sejumlah lahan sawah beririgasi seluas 2.464.420 ha (27,68 %) sudah direncanakan untuk dikonversi ke nonpertanian. Ini menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian pangan (terutama bahan pangan pokok) atau tidak konsistennya pemerintah dengan program ketahanan pangan. Dengan luasan lahan sawah yang ada sekarang, Indonesia masih mengimpor beras apalagi kalau lahan yang ada berkurang cukup nyata.

Kabupaten Indramayu, memiliki lahan sawah paling luas untuk tanaman padi di wilayah jalur pantura Jawa Barat, yaitu 116.039 hektar. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Indramayu adalah petani yang penghidupannya bergantung pada lahan sawah. Sebagaimana kabupaten-kabupaten di jalur Pantura Jawa Barat, umumnya memiliki kebijakan dengan titik berat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan membangun sektor industri. Pesatnya pembangunan sektor industri dan perdagangan membutuhkan lahan, tetapi kebutuhan lahan yang terbesar adalah untuk kepentingan umum (Tabel 1).

Tabel 1. Konversi Lahan Sawah ke Non Pertanian di Kabupaten Indramayu, Tahun 2000 -2009

Tahun	Konversi Lahan						Jumlah
	Kepentingan Umum		Perumahan /Pemukiman		Industri dan Perdagangan		
	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%	
2000	44.224	0,0	-	0,0	-	0,0	44.224
2001	9.040.580	99,5	27.609	0,3	15.463	0,2	9.083.652
2002	203.845	47,3	-	0	227.225	52,7	431.070
2003	135.132	57,3	33.130	14,0	67.775	28,7	236.037
2004	265.784	80,1	27.230	8,2	38.815	11,7	331.829
2005	212.518	70,2	90.202	29,8	-	0,0	302.720
2006	1.093.090	70,5	316.113	20,4	141.226	9,1	1.550.429
2007	144.563	34,0	162.055	38,1	118.376	27,9	424.994
2008	170.622	23,9	176.728	24,8	365.940	51,3	713.290
2009	423.916	36,2	175.742	15,0	570.848	48,8	1.170.506
Jumlah	11.734.274		1.008.809		1.545.668		14.288.751
Rerata	1.173.427		100.881		154.567		1.428.875

Sumber : Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu, 2010. (diolah)

Tabel 1., di atas menunjukkan bahwa secara garis besarnya terdapat tiga tipe konversi lahan sawah beririgasi di Kabupaten Indramayu, yaitu : (1) Konversi lahan untuk kepentingan umum, dan BUMN/BUMD, (2) Konversi lahan untuk perumahan/pemukiman, (3) Konversi lahan untuk kepentingan industri dan perdagangan. Jika dibandingkan dengan total luas lahan sawah di Kabupaten Indramayu (116.039 hektar), konversi lahan sawah beririgasi ke non-pertanian tidak besar (hanya 0,12 % per tahun); tetapi ada kecenderungan konversi lahan sawah ke non-pertanian tersebut meningkat terus, sejalan dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan lahan serta perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Konversi lahan sawah beririgasi teknis ke non-pertanian di Kabupaten Indramayu relatif belum lama dibandingkan dengan kota-kota kabupaten lainnya di jalur pantura Jawa Barat, terutama yang ada di sekitar kota Jakarta seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yaitu setelah tahun 1990an. Namun demikian, dari segi luasannya cenderung meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di atas. Perubahannya terlihat jelas yaitu sejak dibangunnya Kilang Minyak Exor I di Kecamatan Balongan, karena sebelumnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Indramayu sangat lambat dan terkesan sebagai Kabupaten yang sangat agraris, sebagai lumbung padi utama Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, konversi lahan yang telah direncanakan berdasarkan RTRWN tersebut akan melahirkan permasalahan baru, yaitu akan dikemanakan petani yang kehilangan lahan sawahnya dan akan bekerja apa, serta dimana? Bagaimana mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, dan kedaulatan pangan kalau luas lahannya berkurang sementara jumlah penduduk meningkat terus?.

## METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Studi Kasus dan berdisain *multiple case studies*

(Robson, 2005; Yin, 2008) yaitu pada kasus “Kehidupan Petani Pasca Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”, yang mencakup pola dan proses konversi lahan sawah beririgasi menjadi lahan nonpertanian, motif dan motivasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjual lahan sawahnya, kehidupan petani serta jenis pekerjaan yang dilakukan setelah menjual lahan sawahnya.

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data triangulasi, yaitu menggunakan data dengan beberapa cara pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Robson, 2005).

Informan dipilih secara *purposive*, dengan teknik “bola salju” (*snow ball sampling*) yaitu mulai dari satu informan menjadi makin lama makin banyak, sesuai dengan karakteristik yang diperlukan. Penggunaan informan berakhir, jika sudah terjadi pengulangan-pengulangan informasi atau informasi sudah jenuh. Dengan demikian ukuran sampel tidak ditentukan pada awal penelitian, tetapi ditetapkan pada akhir penelitian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka informan pangkal dan informan pokok yang diwawancarai secara mendalam sebanyak 54 orang. Untuk merinci gambaran informan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2., sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Informan dan Jumlahnya

b	Informan Pangkal	Jumlah (orang)	Informan Pokok	Jumlah (orang)
1.	Kepala Desa/Sekdes	10	Petani pemilik	8
2.	Ketua Kelompok Tani	6	Petani pemilik-penggarap	9
3.	Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM)	2	Petani penyakap/penyewa	11
4.	Bappeda	2		
5.	Pengembang ( <i>Developer</i> )	6		
		26		28

Setelah data dan informasi terkumpul, peneliti mendiskusikan kembali kepada informan tentang data yang telah diperoleh, dan mengklarifikasi apakah data yang disajikan sesuai dengan interpretasi peneliti. Kemudian menyempurnakan atau melengkapi kembali. Penulis juga berdiskusi dengan beberapa pakar yang dianggap mengetahui sehubungan dengan topik penelitian.

Di dalam menganalisis beberapa keterangan yang diperoleh, peneliti menggunakan metode deduktif dan induktif (Robson, 2005; Yin, 2008; Santana, 2010). Dari beberapa peristiwa yang terjadi, penulis mencari segi persamaannya (generalisasi), dan dari beberapa peristiwa yang sama terjadi di beberapa tempat, akan dicari keunikannya masing-masing. Menurut Ritzer (2011), informasi yang dikumpulkan melalui wawancara banyak mengandung unsur subjektivitas dari informan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut Coleman (dalam Ritzer, 2011) menyarankan penyempurnaannya dengan beberapa teknik analisis berikut:

- 1) Analisis hubungan suasana (*contextual analysis*), yaitu bahwa tanda-tanda hubungan sosial dari responden (individu) berhubungan erat dengan tanda-tanda dari responden itu sendiri. Artinya karakteristik dari individu itu adalah berhubungan dengan fakta sosialnya.
- 2) Pemisahan atas dasar kesamaan. Individu-individu yang mempunyai karakteristik yang sama, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda.
- 3) Analisis pasangan (*pair analysis*). Disini perhatian dari seorang individu ke individu yang lain. Artinya seorang individu dan individu lainnya menjadi satu unit analisis dan informasi dari seorang individu dapat menguatkan informasi individu lainnya.

Analisis mengenai antar hubungan sosial digunakan metode *verstehen* (*interpretative understanding*) yang mengandung arti seakan-akan penulis mengalami sendiri (Hinkle dalam Ritzer 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola Konversi Lahan Sawah Beririgasi ke Nonpertanian

Berdasarkan fakta di lapangan, pola penggunaan lahan di wilayah penelitian dapat dituturkan sebagai berikut: jika ada pembuatan jalan baru, maka tidak lama kemudian akan tumbuh di kanan dan kiri jalan tersebut bangunan-bangunan baru, yaitu berupa bangunan rumah, perumahan, kantor, perkantoran atau juga toko dan pertokoan. Sehingga, orang awam tidak akan tahu bahwa dibelakang bangunan-bangunan tersebut masih terdapat lahan-lahan sawah. Oleh sebab itu, di Kabupaten Indramayu, dapat dibedakan dua pola pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan, perkantoran, dan perdagangan. Pola pertama di daerah perkotaan dan yang kedua di daerah pinggiran kota (pedesaan).

Pola pertama, di daerah perkotaan. Pengembang akan membeli terlebih dahulu akses (jalan masuk) ke lokasi komplek perumahannya yang berada di belakang rumah-rumah yang sudah ada. Sebagai contoh

perumahan Sapphire Regency, Kepandean Regency, Adava Regency, Sudirman Regency, Bumi Mekar, yang ada di wilayah Kecamatan Indramayu. Kemudian mereka akan mengembangkannya pada lahan-lahan sawah yang ada di sekitarnya, setelah lahan yang ia beli sudah habis terpakai dengan bangunan rumah, dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian lahan sawah sebelumnya. Ini menjadi daya tarik petani menjual lahansawahnya.

Pola kedua pengembang membeli sehampanan lahan yang bebas dari bangunan, biasanya pada jalan-jalan baru atau di pedesaan yang berbatasan dengan kota (kelurahan). Sebagai contoh Perumahan Taman Gatsoe, Perumahan Villa Gatsoe, Perumahan Grand Royal, Perumahan Bumi Karang, Perumahan Gerbang Kencana, Perumahan Simpang Lima Regency, Perumahan Griya Asri di Kecamatan Indramayu; Perumahan Balongan Asri, Balongan Pratama, Perumahan Prawiro Kepolo Residence di Kecamatan Balongan, Perumahan Griya Abdi Karya (KORPRI), Perumahan Graha Panyindangan, Perumahan Sindang Citra di Kecamatan Sindang.

Berdasarkan pelakunya, konversi lahan dibedakan dalam dua pola konversi yaitu pertama langsung oleh pemilik lahannya dan yang kedua diawali dengan alih kepemilikan lahan (penguasaan lahan) terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Irawan (2005), yaitu pola konversi lahan ada dua pola yaitu langsung oleh pemiliknya dan yang diawali dengan alih kepemilikan (penguasaan) lahan, sedangkan penyebarannya mengikuti pola alur jalan raya dan sungai (Jayadinata, 1999).

### Proses Konversi Lahan Sawah Beririgasi ke Nonpertanian

Proses alih kepemilikan lahan sawah dari petani kepada pengembang, berbeda dengan proses alih kepemilikan dari petani kepada Pemerintah. Proses alih kepemilikan lahan kepada Pemerintah diatur oleh Keppres 55 Tahun 1993 dengan alasan penyediaan lahan untuk kepentingan umum. Sebagaimana diisyaratkan oleh Keppres No. 55/1993 tersebut, bahwa pengadaan lahan selain kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara itu, karena untuk kepentingan umum, maka yang dilakukan pemerintah tidak untuk mencari keuntungan

Sebagai contoh di wilayah penelitian adalah kasus pembebasan lahan untuk pembangunan Kilang Minyak Exor I Balongan di Kecamatan Balongan, pembangunan Perumahan Pertamina "Bumi Patra" dan pembangunan Perumahan Pabean Kencana di Kecamatan Indramayu. Proses pembebasan ini memakan waktu yang cukup lama, karena harus adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan (petani) dengan pemerintah dan di samping itu tidak adanya transparansi dari pemerintah. Sebagaimana pendapat Weber (dalam Ritzer, 2011) manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai.

Dalam perkembangan masyarakat, maka setiap hal baru, tentu akan mendapat tanggapan dari masyarakatnya, yang mengarah pada penerimaan dan

penolakan sebagai keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan atas dasar perseorangan, secara musyawarah/mufakat, atau oleh yang berkuasa. Keputusan yang diambil adalah yang mengarah kepada kebaikan (Saifuddin, dkk, 1997), rasional dan menguntungkan (Sitepu, 2010; Turpin dan Marais, 2004; Salusu, 1996).

Proses alih kepemilikan lahan sawah kepada pengembang saat ini berjalan seperti jual-beli lahan pada umumnya, artinya terjadi tawar-menawar tanpa adanya unsur pemaksaan. Bilamana harganya sudah disepakati, akad jual beli dilakukan di hadapan notaris. Dalam hal ini posisi petani pada umumnya tidak tahu peruntukan lahan yang ia jual, karena pembelinya tidak menjelaskan peruntukannya. Ia hanya menawarkan harga yang relatif tinggi.

Dalam kondisi lain, konversi lahan disebabkan lahan sawah sudah kurang produktif dan tidak ada yang melanjutkan pengelolaan lahan sawahnya, seperti yang di alami oleh Hj. Murba Wisesa, H. Murkana. Disamping itu, berdasarkan pertimbangan pemilikinya dengan konversi ke non pertanian (perumahan) lebih menguntungkan, seperti yang dilakukan oleh H. Mashuri dan H. Sirojudin.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses konversi lahan sawah beririgasi menjadi kompleks perumahan dan industri di Kabupaten Indramayu dibedakan dalam empat tipe proses konversi lahan yaitu : tipe pertama karena tindakan spekulator; tipe kedua karena lahan tidak produktif; tipe ketiga karena tidak ada yang melanjutkan pengelolaan lahan sawahnya; dan yang ke empat lebih menguntungkan daripada dipertahankan sebagai lahan pertanian.

#### **Motif dan Motivasi Petani yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Lahan Sawahnya**

Secara umum motivasi petani di daerah penelitian adalah menginginkan agar anak-anaknya, hidup lebih baik daripada dirinya. Usaha pertanian (lahan sawah) dianggapnya berat maka anak-anaknya didorong untuk sekolah hingga ke perguruan tinggi, agar mereka bisa bekerja di perkantoran. Keputusan ini mereka ambil, berdasarkan pengalaman hidup di daerah kota atau di daerah transisi antara desa dan kota, bahwa mereka yang bekerja di perkantoran atau PNS, hidupnya relatif lebih baik, lebih tenang.

Motif petani melepaskan hak kepemilikannya kepada pemerintah pada kasus Kilang Minyak Exor I Balongan, Perumahan Bumi Patra Pertamina dan Perumnas Pabean Kencana karena terpaksa. Akan tetapi, motivasi mereka (petani) melepaskan hak kepemilikan sawahnya adalah kehidupan selanjutnya yang harus lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Oleh sebab itu dalam proses pelepasannya ditempuh melalui musyawarah (Saifuddin, dkk., 1997) yaitu untuk menentukan kesepakatan nilai ganti rugi lahan sawah yang cukup adil.

Disamping karena terpaksa, terdapat motif lain, seperti yang dikemukakan oleh petani pemilik yang juga sebagai pengembang yaitu karena lahan tidak produktif, hasilnya relatif kecil. Adapun motivasinya tetap sama agar kehidupannya lebih baik, seperti yang dituturkan Sirojudin, Edi Junaedi, Ahmad Yani,

Kusnomo dan Muhaemin sebagai berikut :

“ ..... hasil pertanian lahan sawah relatif kecil, karena harga jual ditentukan oleh pembeli (tengkulak) bukan oleh pemilik barang. Harga lahan per m<sup>2</sup> lahan sawah relatif murah, tetapi kalau sudah menjadi lahan bangunan menjadi beberapa kali lipat, sehingga keuntungannya lebih besar”.

Di samping itu, ada motif lain karena tidak ada yang melanjutkan usaha pertaniannya sehingga menjadi beban, yang disebabkan anak-anaknya berada di luar Indramayu dan sudah mapan dan ia sendiri sudah tua, dan ingin menikmati hari tuanya seperti yang dituturkan oleh Hj. Murba Wisesa yaitu :

“ ..... anak saya sebelas orang, semuanya sudah bekerja dan delapan orang berada di luar Kota Indramayu, hanya tiga orang tinggal di Kabupaten Indramayu. Yang tinggal di Indramayu semuanya PNS”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa motif petani menjual lahan sawah pada kasus konversi lahan sawah ke nonpertanian di Kabupaten Indramayu adalah terpaksa; lahan kurang produktif; lahan sawah tersebut menjadi beban. Adapun yang menjadi motivasi pemilik lahan sawah menjual lahan sawahnya atau mengonversi lahan sawahnya menjadi perumahan adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya sebagai wujud prestasi aktifitas hidupnya. Hal ini sejalan dengan Mc Clelland (1961), Maslow (1970) yaitu dengan pendapatan yang besar, maka ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **Kehidupan Petani Pasca Konversi Lahan Sawah ke Nonpertanian**

Di wilayah penelitian, petani dapat dibedakan kedalam petani pemilik lahan, petani pemilik-penggarap, penyakap dan penyewa. Kehidupan mereka pasca menjual lahan sawahnya atau lahan sawahnya dikonversi ke non pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut.

Petani pemilik dalam penelitian ini adalah petani pemilik-penggarap lahan sawahnya sendiri yang karena alasan tertentu (lahan sawah kurang produktif, keluarganya tidak ada yang melanjutkan usahataniannya, kebutuhan yang mendesak) telah menjual lahan sawahnya kepada developer (pengembang) atau yang mengonversi lahan sawahnya ke non pertanian secara langsung. Tindakan petani menjual kepada pengembang atau mengonversi lahan lahan sawah secara langsung adalah suatu tindakan yang rasional dan menguntungkan secara ekonomi (Sitepu, 2010; Turpin dan Marais, 2004; Salusu, 1996).

Dengan demikian dapat dikatakan pada satu sisi konversi lahan sawah ke nonpertanian merupakan suatu cara untuk meningkatkan taraf hidup, karena nilai jual tanah akan naik. Nilai jual lahan bangunan lebih tinggi daripada nilai jual lahan sawah. Pemanfaatan lahan sawah sangat terkendala dengan adanya musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lain halnya dengan lahan bangunan, bisa kapan saja dimanfaatkan. Ini yang menarik konversi lahan sawah ke nonpertanian di daerah perkotaan. Uang hasil penjualan lahan sawah maupun konversi lahan sawah tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya hingga perguruan tinggi, sebagai modal usaha dan menikmati hari tua.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan petani pemilik lahan sawah pasca konversi lahan baik dengan cara menjual lahan sawahnya kepada pengembang atau mengonversikan sendiri lahan sawahnya menjadi kompleks perumahan pada umumnya jauh lebih baik dari sebelumnya dan dapat menikmati hasilnya. Di samping itu anak-anaknya umumnya berhasil, baik dari segi pendidikan maupun pekerjaannya dan banyak yang bekerja di luar Kabupaten Indramayu.

Petani pemilik-penggarap dalam penelitian ini adalah petani yang memiliki lahan sekaligus mengerjakan usaha taninya di lahan tersebut, yang telah melepaskan hak kepemilikan lahannya kepada pemerintah (melalui proses ganti rugi) yang kemudian lahan sawah tersebut dikonversi ke nonpertanian Kilang Minyak Exor I, Perumahan Bumi Patra dan Perumnas). Dalam proses pembebasan lahan inilah terjadi tarik menarik antara kepentingan petani dan panitia pembebasan lahan (pemerintah), terutama dalam hal menetapkan kesepakatan harga penglepasan hak kepemilikan lahan sawah oleh petani yang ditempuh dengan beberapa kali musyawarah antara panitia pembebasan lahan (pemerintah) dengan perwakilan petani yang memakan waktu cukup lama (lebih dari satu tahun). Hal ini menunjukkan keterpaksaan petani melepas lahan sawah miliknya, yang disebabkan sebelumnya para pemilik lahan (petani), menolak harga yang telah ditetapkan (ditaksir) oleh pemerintah. Para petani pemilik sawah baru akan melepaskan hak kepemilikannya, manakala ia sudah merasa pasti ada penggantinya yang lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu informan pokok (Suratno, 1996):

“Walaupun harga tersebut di atas harga pasaran, namun kami perlu ada jaminan bahwa pendapatan kami dari tanah tidak menurun, paling tidak kami dapat membeli lagi tanah sawah yang kami jual, sehingga mata pencaharian kami tidak hilang. Toh dengan dijualnya sawah, saya tidak memiliki pekerjaan lain”.

Pernyataan di atas sejalan dengan penuturan petani yang telah melepas hak kepemilikan lahan sawahnya ke pihak pemerintah dengan cara ganti rugi. Hasil wawancara dengan Darta, Syarkat, Rosyid, Darih dan Kusna dapat disimpulkan sebagai berikut:

“..... dengan melepas hak kepemilikan sawahnya mereka dapat membeli lahan sawah penggantinya yang lebih luas, membangun rumah dan atau sebagai modal usaha serta biaya menyekolahkan anak-anaknya dan bahkan untuk biaya pergi haji ke Tanah Suci Mekah”.

Petani Penyakap dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani pada lahan sawah orang lain dengan sistem sakap (bagi hasil dan bagi resiko) untuk waktu tertentu, yang kemudian lahan dikonversi ke nonpertanian. Petani Penyewa adalah petani yang melakukan usahatani pada lahan sawah orang lain yang disewanya untuk waktu tertentu, yang kemudian lahan dikonversi ke nonpertanian. Baik petani penyakap, maupun penyewa kehidupannya lebih buruk dari pada sebelumnya, karena kehilangan penghasilan utamanya dari hasil lahan sakapan atau sewaan dan jatuh menjadi buruh tani. Sebelum ia mendapatkan lahan garapan yang baru, ia banyak dibantu atau hidupnya banyak bergantung kepada ketua kelompok tani. Padahal ketua kelompok tanipun,

ia menyewa lahan sawah yang umumnya berupa lahan guntay. Ini menunjukkan pada diri sesama petani, masih ada rasa saling menolong, walaupun ia sendiri tidak kaya. Artinya apa yang dikemukakan oleh Geertz (1983) tentang involusi pertanian (kemiskinan bersama) diduga masih berjalan di daerah penelitian, malah kondisinya lebih parah.

Bagi petani penyakap/penyewa yang mempunyai keterampilan lain seperti operator *hand tractor*, kehidupannya tidak terlalu buruk, namun tetap penghasilannya menjadi berkurang. Begitu juga dengan petani penyakap/penyewa yang beralih profesi menjadi penjaga sekolah atau pedagang, kehidupannya agak lebih baik.

#### **Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Petani dan Kesejahteraan Petani**

Secara umum terdapat empat jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus menggarap lahannya, petani penyakap/ penyewa, dan buruh tani. Semua jenis petani tersebut, hidupnya banyak bergantung pada lahan usahatani. Petani tersebut melaksanakan pekerjaan usahatani bukan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi justru sebagian besar hasilnya (bahan pangan) diperuntukkan bagi masyarakat yang bukan petani. Jika, luas lahan usahanya berkurang karena konversi lahan, maka produksi bahan pangan yang dihasilkannya berkurang, sedangkan kebutuhan pangan selalu meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk yang selalu meningkat terutama di negara-negara agraris yang sedang berkembang seperti Indonesia. Jika produksi pangan berkurang, tentu saja akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang selanjutnya akan berdampak pada kedaulatan pangan.

Jika negara tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka salah satu solusinya adalah dengan membuka keran impor. Artinya negara tersebut tidak berdaulat dalam pangan, karena kecukupan pangan ditentukan oleh negara pengekspor pangan. Apa artinya pangan suatu negara cukup, tetapi masyarakatnya tidak mampu membelinya. Hal ini, disebabkan pembelinya mayoritas petani sebagai produsen dan konsumen pangan. Dengan demikian dapat dikatakan konversi lahan pertanian ke non-pertanian merupakan salah satu ancaman terhadap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara negara agraris.

Agar ketahanan pangan tetap stabil diperlukan kedaulatan petani dalam hal menghasilkan pangan. Sedikit ada dua kedaulatan yang harus dimiliki petani yaitu kedaulatan penguasaan lahan dan kedaulatan pemanfaatan lahan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka petani tersebut tidak berdaulat. Sebagai contoh pada jenis petani di atas, petani penyakap/penyewa hanya akan menguntungkan pemilik lahan saja. Berkenaan dengan kesejahteraan petani, maka yang bisa sejahtera hanyalah pemilik lahan dan petani pemilik yang sekaligus menjadi penggarap, dan inipun jika luas lahannya memadai. Untuk lahan sawah dengan komoditas padi sawah minimal luasnya harus dua hektar (UUPA, 1960). Dengan demikian, jika luas lahannya tidak memadai, maka akan menjadi beban pemerintah.

Ketersediaan pangan atau kecukupan pangan bagi masyarakat sampai saat ini masih menjadi persoalan yang serius. Hal ini disebabkan masalah pangan berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Soekarno (1953), pendiri bangsa dan Presiden pertama Republik Indonesia mengatakan bahwa “pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa”; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”. Sejalan dengan pendapat Jhamtani (2007), yaitu jika kita ingin menguasai dunia, kuasai dahulu pangannya. Artinya petani sebagai produsen pangan, kehidupannya harus sejahtera. Oleh karena itu perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner untuk memenuhi kebutuhan pangan (ketahanan pangan). Ketahanan pangan menurut UU No. 18/2012 adalah:

“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Untuk mencapai hal itu, seringkali pemerintah rela melakukan “impor beras”, sekalipun harus mengabaikan dan bahkan mengalahkan petani, sebagai produsen pangan (beras) itu sendiri. Di mata petani, ketahanan pangan hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal besar.

Petani seringkali mengeluh, sedikitnya dua kali dalam setahun. Bisa kita bayangkan berapa kali petani mengeluh, berapa orang petani yang mengeluh semenjak ia menjadi petani. Pada musim panen yang berhasil, produksinya melimpah, harga gabahnya turun, petani mengeluh karena tidak dapat memperoleh untung yang sesuai dengan harapannya. Pada musim panen yang kurang berhasil (gagal), harga gabahnya naik, tetapi tidak ada gabah yang mau dijual. Jadi bagi petani sama saja, baik panennya berhasil maupun gagal yaitu sulit untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Bagaimana ketahanan pangan bisa terwujud, kalau petaninya sebagai produsen mengeluh terus dan jauh dari sejahtera?

Jika keadaan ini tidak segera ditangani dan dicarikan solusinya, suatu saat petani bisa mogok menjadi petani, tidak ada yang mau jadi petani karena pertanian tidak menjanjikan hidup bisa sejahtera. Setelah itu, negara menjadi impotir beras terbesar di dunia, kebutuhan akan pangan menjadi bergantung pada negara lain. Artinya kedaulatan pangan akan pangan menjadi terancam. Fenomena ini sudah mulai nampak di daerah-daerah perkotaan dan daerah yang berbatasan dengan kota, dimana generasi mudanya sudah banyak yang meninggalkan dunia petanian dan para orangtuanya pun mendukungnya.

Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut tidak terlepas dari hilangnya kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Adapun kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam

negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keamanan lokal.

Pada dasarnya kedaulatan pangan menjadi suatu prasyarat bagi terjadinya sebuah ketahanan pangan. Sesuatu hal yang mustahil di negara agraris, jika kedaulatan pangan tidak dimiliki, maka ketahanan pangan akan tercipta. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumber daya produktif serta dalam menentukan sendiri kebijakan produksi.

Ada yang salah dengan paradigma kebijakan pangan, pertanian, dan perdagangan Indonesia, yang ternyata Indonesia bukan menjadi negara yang mandiri dan kuat dalam pangan, melainkan justru membalikkan status dari eksportir menjadi importir. Dalam banyak kasus, justru pemerintah sendiri, lewat berbagai kebijakan perdagangan yang menggampangkan impor, tidak konsisten dalam program swasembada dan upaya membangun kedaulatan pangan. Belum lagi dengan maraknya konversi lahan sawah di sentra-sentra produksi padi ke sektor non pertanian, luas lahan sawah beririgasi menjadi berkurang. Dengan luas lahan pertanian yang ada sekarang saja, kita sulit berswasembada pangan, sulit mencapai ketahanan pangan yang stabil, apalagi lahan-lahan produktif tadi selalu berkurang setiap tahunnya.

Yang menjadi salah satu pemicunya adalah dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah dan lemahnya penegakan hukum, dimana banyak daerah-daerah mengejar pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri yang tidak berbasis pertanian. Semuanya itu membutuhkan lahan yang luas, dan yang menjadi sasaran adalah lahan-lahan sawah yang beririgasi teknis, seperti yang terjadi di wilayah jalur pantura Provinsi Jawa Barat, salah satunya wilayah Kabupaten Indramayu.

Sangat disayangkan, respon pemerintah terhadap keluhan para petani padi yang muncul selama ini, juga cenderung reaktif. Defisit pangan dan kelangkaan pasokan pangan diatasi dengan membuka keran impor dan korporatisasi pertanian pangan, bukannya membenahi sisi produksi, distribusi, infrastruktur, dan insentif produksi bagi petani. Tanpa komitmen kebijakan kuat untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan serta keberpihakan kepada petani dan kepentingan jangka panjang nasional, Indonesia hanya akan terseret ke dalam politik perdagangan panglobal.

Kemudian dalam pasal 45 UU No. 7/1996 dinyatakan bahwa : “Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat”.

Dalam pasal 45 tersebut di atas, hanya disebut peran pemerintah. Lalu bagaimana peran petani sebagai produsen dan konsumen, agar ketahanan pangan tersebut bisa terwujud?. Kenyataan di lapangan justru keadaan petani di lapangan justru dimarginalkan. Padahal, pemeran utama sektor pertanian adalah para petani.

Petani merupakan titik sentral, pusat apa yang mereka namakan "kedaulatan pangan" (*food sovereignty*). Mereka bukan hanya konsumen, melainkan sekaligus sebagai produsen bahan pangan itu sendiri. Bahkan mereka adalah pusat penciptaan "kedaulatan pangan" itu. Pemeran utama pertanian adalah para petani itu sendiri, yang harus menjadi titik sentral program pengadaan pangan. Akan tetapi, mungkinkah hal itu terwujud bila petani tetap diposisikan dan diinterpretasikan sebagai produsen "skala kecil" yang dinilai tidak mampu untuk terlibat sebagai agen utama penyangga "ketahanan pangan" (Winarto, 2011).

Sebagai-mana telah dirumuskan dalam UU No.41/2009 pasal 1 ayat 11 sebagai berikut: Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

Indonesia jangan terlalu lama terlena dan berbangga diri dengan jumlah petani yang banyak (> 60 % penduduk di Indonesia bermatapencaharian sebagai petani) tetapi banyak yang miskin, seharusnya paradigma ini diubah menjadi "biarlah jumlah petani kita sedikit, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pangan negara, bahkan bisa memenuhi pangan dunia, dan petaninya sejahtera". Kita harus ingat janji negara pada saat kemerdekaan bangsa ini yang tertulis dalam UUD 1945, yaitu: melindungi, mencerdaskan dan men-sejahterakan rakyatnya ?

Petani Indonesia adalah rakyat Indonesia juga. Jadi petani juga berhak untuk sejahtera. Kita harus merencanakannya mulai dari sekarang sebelum terlambat, berapa kita butuh lahan sawah, lahan tegalan untuk memenuhi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Berapa jumlah petaninya ?, dan juga harus terukur dan tergambarkan dengan jelas!. Untuk itu kita harus berani mengubah konsep peasant (petani kecil) menjadi farmer (petani kaya) melalui Reforma Agraria dan Landreform dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah merupakan sebuah negara yang sangat luas. Menurut data Bapenas, Luas daratan Negara Indonesia adalah 188 juta hektar (Panuju, 2012).

Untuk mengarah ke sana (negara agraris yang maju dengan petani yang sejahtera), apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Reformasi agraria, Redefinisi petani, Kepastian berusaha tani, Transformasi sosial ekonomi pertanian, dan Kebijakan Pertanian yang berpihak pada kepentingan petani sebagai produsen pangan. Seandainya, data di atas dapat diandalkan, maka sebenarnya kita dapat melaksanakan Reformasi Agraria sebagai perwujudan

implementasi UU No 5/1960 tentang UUPA dan UU No 56/1960 tentang Penetapan Luas lahan Pertanian (distribusi lahan kepada masyarakat yang betul-betul mempunyai keterampilan sebagai petani).

Hanya saja, pelaksanaannya tidak seperti program transmigrasi dulu. Sekarang petaninya harus lebih selektif. Lokasinya harus memiliki akses yang lebih baik. Perencanaan dan pelaksanaannya lebih terintegratif antar Kementrian di Pusat Pemerintahan maupun antar dinas di daerah. Pada intinya yang utama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berdaulat adalah harus ada penambahan luas lahan lahan sawah dari tahun ke tahun yang lebih luas dari lahan sawah yang telah dikonversi ke nonpertanian. Permasalahannya adalah dimana penyebaran potensi lahan pertanian yang cocok untuk sawah tersebut dan bagaimana status lahannya? Walau pun sudah dapat diperkirakan, penyebaran lahan tersebut ada di luar Pulau Jawa, tetapi secara detailnya belum tahu.

Pertanian dalam bentuk agribisnis harus dilaksanakan untuk membantu krisis ekonomi. Kenyataannya menunjukkan bahwa selain industri migas, sektor agribisnis adalah penyumbang ekspor yang penting selama hampir 30 tahun Indonesia membangun. Pada masa krisis ekonomi, sektor ekonomi yang masih mampu bertahan adalah sektor agribisnis. Pengalaman ini seharusnya kita sadari (termasuk pemerintah), bahwa kita harus kembali ke strategi industrialisasi yang berbasis agribisnis. Saragih (2010), agribisnis yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan paradigma baru pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian, berupa agribisnis hulu sampai hilir yang dikemas dalam lima sub sistem agribisnis termasuk di dalamnya konsep agro industri. Kelima subsistem agribisnis tersebut adalah subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong kemandirian petani sebagai produsen pangan. Untuk itu pemerintah harus menggalakkan pelaksanaan program transformasi sosial ekonomi di bidang pertanian (agroindustri).

Dengan memberi prioritas pada percepatan pembangunan sektor agribisnis, akan mampu memberikan solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya produksi produk-produk agribisnis akan meningkatkan ekspor tanpa harus mengimpor bahan baku. Meningkatnya ekspor berarti meningkatkan penawaran valuta asing (*dollar*) sehingga akan memperkuat (*apresiasi*) rupiah secara gradual. Selain produk agribisnis untuk ekspor, produk agribisnis bahan pangan juga akan meningkat, sehingga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri juga meningkat.

Dengan ketersediaan pangan yang terus meningkat maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan agroindustri sebagai wujud upaya transformasi di sektor pertanian, sehingga akan tercipta lapangan-lapangan kerja baru yang bisa menampung tenaga kerja petani yang tidak memiliki lahan. Proses transformasi pada dasarnya merupakan sebuah proses pembangunan pertanian, yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian.

Perubahan tersebut tidak hanya berupa mekanisasi dan teknologi, namun lebih jauh pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakatnya, seperti masalah perubahan identitas, otoritas, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian proses transformasi pertanian dapat diartikan sebagai proses transformasi pedesaan menjadi desa maju/modern.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Kabupaten Indramayu sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kabupaten agribisnis dengan kekhususan sebagai pengembangan pertanian dataran rendah. Dari lima subsistem yang ditawarkan oleh Saragih (2010), baru satu subsistem agribisnis yang sudah berjalan, yaitu subsistem budidaya pertanian. Oleh sebab itu, kehidupan petani terutama petani penyakap, penyewa dan buruh tani jauh dari harapan (pada umumnya hidup miskin).

## SIMPULAN

1. Kecuali proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan umum, maka penggunaan lahan pertanian berproses menurut mekanisme pasar, sehingga konversi lahan sulit dicegah atau dihentikan,.
2. Hak milik yang melekat pada lahan merupakan hak yang "terkuat dan terpuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah tetapi memiliki fungsi sosial. Oleh sebab itu walaupun penggunaan atau pemanfaatannya bergantung pada keinginan pemilik lahan, sehingga cenderung memiliki kebebasan untuk melakukan konversi, tetapi jika diperlukan pemerintah untuk kepentingan sosial (umum), pemilik harus melepaskannya, namun pemerintah harus memperhatikan asas-asas keadilan agar tidak merugikan pemilik lahan yang bersangkutan.
3. Konversi lahan pertanian ke non pertanian dapat memberikan dampak positif yaitu mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan (profesi) baru; namun demikian konversi lahan dapat mengancam ketahanan pangan suatu wilayah dan dalam skala nasional.
4. Keberhasilan petani dalam peningkatan status sosial dan ekonomi keluarganya dapat mempercepat terjadinya konversi lahan.

## SARAN

1. Saran untuk pengembangan Ilmu
  - a. Untuk pengembangan ilmu sosiologi pertanian maka penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian tentang : (1) Perilaku petani berlahan sawah luas terhadap kehidupannya, karena dari hasil penelitian ini terdapat kecenderungan bahwa petani yang berlahan luas (lahan sawah) akan semakin luas dan menimbulkan terjadinya lahan-lahan guntay, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
2. Saran untuk kepentingan praktis
  - a. Untuk mengganti lahan-lahan sawah yang telah dikonversi ke nonpertanian, perlu upaya penambahan melalui pencetakan lahan sawah di luar Pulau Jawa yaitu pada lahan cadangan yang potensial untuk pertanian lahan sawah, minimal sebesar luas lahan sawah yang telah dikonversi

secara nasional sebagai implementasi UU No. 56 tahun 1960 tentang Landreform, UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 41 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 26 tentang Penataan Ruang.

- b. Dalam mengisi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) perlu adanya peta yang dapat dijadikan acuan bersama yaitu peta persil lahan. Peta persil lahan harus dimiliki oleh setiap dinas/instansi yang erat kaitannya dengan lahan yaitu: Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas Tata Ruang, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa, di samping Kantor Pajak.
- c. Dalam upaya mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis, maka perlu upaya pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan laju konversi lahan sawah ke nonpertanian melalui RUTRW dan RDTRW sesuai dengan fungsi Pemerintah dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu : " Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu pencadangan (penetapan) lahan pertanian pangan berkelanjutan agar segera dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dan tidak menjadi objek konversi lahan. Bagi kabupaten/ kota yang sudah melakukannya, agar menjaganya secara konsisten.
- d. Untuk mencegah terjadinya percepatan konversi lahan sawah beririgasi ke lahan nonpertanian pemerintah wajib menegakkan aturan kepemilikan lahan yang melebihi aturan, sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak orang yang memiliki lahan yang melebihi ketentuan tersebut bahkan bersifat guntay, baik yang dimiliki petani maupun spekulan, yang dengan karakter kepemilikan yang terkuat dan terpuh cenderung untuk mengalihkan lahan sawah menjadi lahan non pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- de Vries, Egbert., (1985). *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarta.
- Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, 2012. Laporan Tahunan 2011.
- Geertz, Clifford., 1983, *Involusi pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bharata Karya aksara, Jakarta.
- Ilham, Nyak., Yusman Syaukat, Supena Friyatno, 2004. *Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Irawan, Bambang., 2005. *Konversi Lahan sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatan, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 No. 1, Juli 2005.
- Isa, Iwan., 2006. *A Strategy to Control Agricultural Land Conversion. Prosiding Seminar Multifunctionality and Revitalization of Agriculture*. Indonesian Agency for Agricultural Research & Development, Ministry of Agriculture; Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Japan.
- Jayadinata, J.T., 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Dan Wilayah*. Edisi ketiga. Penerbit ITB, Bandung.



- Jhamtani, Hira., 2007. *Kelaparan Adalah Keputusan Politik. Dalam George, Susan, Pangan dari Penindasan Sampai Ketahanan Pangan*. Penerjemah Magdalena Sitorus. Insist Press, Yogyakarta.
- Maslow, A.H., 1970. *Motivation and Personality*. Third Edition. Harper & Row, Publisher, Inc. New York.
- McClelland, D.C. 1961. *The Achieving Society*. Terjemahan, Siswo Suyanto dan Wilhelmus W. Bakowatun, 1987. Intermedia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ke-28. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Panuju, Tunggul Iman., 2012. *Mempertahankan Tanah Agraris. Buletin Penataan Ruang. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian*. Edisi Maret-April, 2012.
- Ritzer, George., 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Penerjemah Alimandan*. Edisi pertama, Cetakan ke-9. Rajawali, Jakarta.
- Robson, Colin., 2005. *Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers*. Second Edition. Blackwell Publishing.
- Saifuddin, A.M., Amir Azis, Said Rusli, dan Soleh Widodo, 1997. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosiologi*. Cetakan Ketiga. Departemen Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Salusu, J, 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Cetakan Pertama. PT. Grasindo, Jakarta.
- Santana, Septiawan K., 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua, Edisi kedua, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Saragih, Bungaran., 2010. *Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Cetakan Pertama. Edisi Ketiga. IPB Press Bogor.
- Sitepu, B.P, 2010. *Premis Pengambilan Keputusan*. bintang sitepu. [wordpress.com/2010/09/08/premis-pengambilan-keputusan/...](http://wordpress.com/2010/09/08/premis-pengambilan-keputusan/...) Diunduh tanggal 20 Februari 2013.
- Soekarno, 1953. *Soal Hidup atau Mati*. Pidato Presiden Republik Indonesia pada peletakan batu pertama Gedung Fakultas pertanian Universitas Indonesia pada Tanggal 27 April 1952. Almanak Pertanian Tahun 1953.
- Suratno, Ujang., (1996). *Pola-Pola Penyelesaian Konflik Pertanahan di Dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Indramayu dan Balongan Kabupaten Indramayu)*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Winarto, Y.T., 2011. *Bisa Dewek : Kisah Perjuangan Petanio Pemulia Tanaman di Indramayu*. Gramata Publishing, Depok.
- Yin, Robert. K., 2008. *Studi Kasus. Desain dan Metode*. Penerjemah M. Djauzi Mudzakir. Edisi Pertama. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.